BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No 18 Tahun 2008 sampah merupakan limbah padat yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari maupun dari proses alam. Populasi yang semakin meningkat setiap tahun otomatis akan meningkatkan jumlah produksi sampah. Sampah menjadi salah satu tantangan yang sangat mendesak saat ini. Pada 2030, dunia diperkirakan akan menghasilkan 2,59 miliar ton sampah setiap tahun dan diperkirakan akan mencapai 3,40 miliar ton pada tahun 2050, negara-negara berkembang diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat sehingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan di setiap negara harus dilakukan (Rahim 2020)

Sebelumnya banyak orang yang berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi pada lingkungan sering terjadi akibat faktor alam, misalnya iklim, yang meliputi temperature, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, topografi, geografi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya orang-orang mulai sadar bahwa kegiatan sehari-hari manusia juga dapat menjadi pengaruh iklim dan lingkungan(Kahfi 2017). Jika permasalahan sampah dibiarkan berjangka panjang dapat menyebabkan bencana alam, misalnya longsor dan banjir. Selain itu, banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berakibat fatal terhadap kesehatan manusia.

Peran pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang baik diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti penyediaan wadah pembuangan sampah, kendaraan pengangkut sampah, hingga tempat pembuangan akhir agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan efisien

(Elamin dkk. 2017). Namun, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan juga tak kalah penting karena lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang sampahnya masih terbilang tidak efisien dalam pengelolaannya. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat membuat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga memicu pembuangan sampah sembarangan masih marak terjadi. Sementara itu, cakupan wilayah layanan pengelolaan sampah juga masih kurang yaitu hanya 1 dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto telah mengatur kebijakan dan strategi pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi ”Kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sedikit memuat:

a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
b. Program pengurangan dan penanganan sampah; dan
c. Target pengurangan timbunan dan target penanganan sampah.”

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2019 juga telah menetapkan Sanksi Administratif pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. uang paksa; dan/atau
d. pencabutan izin;

e. penutupan usaha/kegiatan.”

Dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efektif. Namun, fakta dilapangan menunjukkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah belum berjalan dengan optimal. Masih banyak terdapat tumpukan sampah seperti di pinggir jalan, pasar dan tempat umum lainnya. Hal tersebut terjadi karena fasilitas dalam pengumpulan dan pengangkutan tidak memadai ke beberapa wilayah.

Gambar 1
Tumpukan Sampah Warga BTN



Sumber: mediasulselcom

Dikutip dalam mediasulselcom, masyarakat mengeluhkan tentang tempat pembuangan sampah yang kurang sehingga masyarakat bingung harus membuang sampah kemana dan sampah menumpuk hingga ke bahu jalan. Sampah yang berserakan dijalan dapat menghalangi kendaraan yang ingin melintas di lokasi tersebut. Selain kurangnya tempat pembuangan sampah, pengangkutan sampah juga menjadi penyebab menumpuknya sampah-sampah tersebut. Tempat pembuangan sementara yang kurang strategis turut memperburuk sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto.

Lemahnya sistem koordinasi antar pihak terlibat merupakan faktor lain yang menjadi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto. Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan peraturan dan strategi, namun sulit untuk mencapai hasil maksimal memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Selain itu, anggaran juga menjadi faktor kendala utama dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah tidak merata ke seluruh wilayah Kecamatan Binamu.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto masih belum efektif dalam pengimplementasiannya, terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah menjadi salah satu alasan kebijakan tersebut tidak efektif. Selain itu, sarana dan prasarana yang tidak memadai membuat masyarakat bingung harus membuang sampah di mana. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji **"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jeneponto"** dengan harapan output dari *Policy Brief* ini dapat menemukan Solusi dari permasalahan yang sedang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto?
2. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan sampah, serta dapat menjadi landasan bagi pelajar atau peneliti lainnya yang ingin meneliti terkait pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil dari penelitian dapat menjadi pertimbangan dan landasan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto khususnya di instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menambah pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

c. Bagi Politeknik STIA LAN Makassar

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi pengembangan wawasan dan referensi bagi mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar yang ingin melakukan penelitian terkait pengelolaan sampah.